



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER DAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN GUNA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2022, Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bulan Maret Masa Persidangan Ke – II (Kedua) Tahun Sidang 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.13/21/DPRD, Tanggal 14 Maret 2022 Perihal : Undangan.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.13/99/DPRD, Tanggal 14 Maret 2022 Perihal : Undangan.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam Rangka Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Para Pihak yang Berkepentingan Guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret 2022
Pukul : 11.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Penyumbolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak Budi Santoso, S.T.,M.Si, selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

E. PESERTA RAPAT

1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kab. Paser :
 1. Budi Santoso, S.T.,M.Si
 2. M. Ramlie S Bakti
 3. Umar(Daftar Hadir terlampir)
2. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Paser terkait:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Paser di Tana Paser
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Paser di Tana Paser
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser di Tana Paser
 4. Kabag Hukum Setda Kab. Paser di Tana Paser(Daftar Hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

Adapun hasil dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser pada tanggal 22 Maret 2022 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi adalah sebagai berikut:

- Budi Santoso, S.T.,M.Si
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Paser di Tana Paser

Ketahanan pangan tahun ini agak terlaras dengan adanya Perda ini kita akan mengatifikasi adanya tentang ketahanan pangan Nasional kita ada data 35 Desa Rawan Pangan, kami sudah mencoba membuat profilnya apabila masala insfruktur kita meminta PU untuk membantu kita, kita bisa satu pintu pada dinas kesehatan tepi kita bisa melakukan audian,apa yang disampaikan dengan pimpinan rapat menyadari asistem II sudah mengatasi 70 persen ketahanan pangan dari luar pada hal dari 70 persen ada juga dari kita, tapi telur dan daging itu dari luar, hari ini harga naik adalah harga sapi dan lombok, kita tidak terlalu dipusingkan dengan lombok kerana dari petani kita sendiri, itu yang bisa saya sampaikan perda ini bersumber pada 2 hal badan ketahanan pangan sampai saat ini belum ada pejabat dibawahnya, yang menjadi masalah sekarang adalah masalah minyak goreng di katanya menteri perdagangan tidak mampu.
- Budi Santoso, S.T.,M.Si

Jadi memang kita kemeteri kosengram supaya sama-sama memahami, sama-sama mendapat masukan nanti mama ketahanan dan mana cadangan, tugas ketahanan pangan dalam kontroling harga apak ini niaganya saja atau ini yang harus di kelirkan duluh, pertemuan besok fokus kepasal atau ketiknis raperdanya.
- Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Paser di Tana Paser

Kami merasa sangat sengan dengan rapat dengan pendat ini kami dari dinas ketahan pangan ada dasar yudiusnya, acuan atau freprensi dalam rangka kami membuat program bagaimana ketahan pangan kita. Tadi sudah di gambarkan oleh pa Asistem kita teman-teman bidang harus kuat juga sehingga

penyelenggaraan ketahanan pangan dikabupaten paser ini betul-betul menjadi kekuatan pagi daerah kita karena ada 275 ribu penduduk kita tidak boleh kelaparan kita harus sediakan pangan dan mengantisipasi ketahanan pangan yang dibentuk baru-baru ini selaras dengan keinginan daerah yang pertama mendasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pangan adalah merupakan kebutuhan dasar hak asasi oleh karena itu pemerintah negara yang diwakili oleh pemerintah baik itu pemerintah daerah wajin kesedian pangan bagi daerah. Ini juga dijamin dalam undang-undang 1945 bahwa SDM berkualitas yang lain dari kami mengapa sangat penting perda ini bawah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah kita secara otonomi kita bisa menentukan arah bagaimana pengaturan rumah tangga kita sendiri ini juga menjadi dasar kami, dan juga di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2017 tentang mengatur urusan daerah ketahanan pangan ini wajib artinya di daerah harus ada pengurusan harus bisa dikondisikan sehingga bisa daerah bisa jadi kuat dan pelaksanaan dalam pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi ini pemerintah pusat pengaturnya secara global dimelihat NTT, Jawa, tapi spesifik lokal tidak dilihat sesuai dengan undang-undang, daerah di dorong untuk membina untuk membuat peraturan sehingga masyarakat bisa berperan didalamnya kemudian potensi lokal diangkat sehingga berapa pentingnya perda ini, selain itu juga ketahanan pangan dan gizi baik saat ini mau saat akan datang terkait IKN itu juga menjadi penyangga kita sebagai mana ketahanan pangan kita disitu pentingnya kesediaan pangan, akses ekabilitas itu sudah menggambarkan lintas masukan dan harga antara OPD ini sinerginya harus kuat di dalam perda ini mengatur nanti bagaimana koordinasi kita dalam kesediaan pangan di paser kalau tidak maka kita bisa jalan sendiri-sendiri, bahkan kepala daerah dituntut Gubernur dan Bupati/Wali kota berperan aktif dan kreatif yang disampaikan kemendagri kita bisa koordinasi dengan daerah lain yang mempunyai potensi, punya surplus pangan apa, kita bisa bekerjasama dengan mereka ini mudah-mudahan dilihat nanti dimana didalam perda mengatur tentang pangan, sedikit mengarah pangan kita saat ini sebagai tolak ukurnya adalah tentang pola pangan harapan kita kesediaan pangan, saat ini kita belum edial kesediaan harus kemandirian kata pimpinan rapat, sementara kita belum mandiri 70 persen kata asisten masyarakat kita itu yang menjadi kondisi kita, kemudian konsumsi kita belum kita masih belum pangan beras, kalau beras sudah menjadi dasar kita, tahun bahari dulu karena ada Swasembada pangan lokal kaya sagu, jagung dan sebagainya itu jadi tidak menjadi prioritas, ini tidak mencerminkan kearifan lokal nanti sagu kita nanti bisa diangkat dalam perda ini nanti dan yang lain adalah kondisi daerah kita ada rawan pangan masih ada 77 desa karena aspek dari akses jalan kemudian tenaga kesehatan, sarana prasarana air bersih misalnya kemudian listrik dan yang lain itu antara kesediaan pangan dengan jumlah penduduk tidak seimbang jadi harus mendatangkan dari luar ini lah yang perlu kita dorong ketahanan pangan lokal nanti kita akan membantu bagaimana bedanya pangan dengan raperda yang kita masuki ini, belum lagi terkait produksi pertanian akan menggambarkan bagaimana kondisi beras kita yang nanti bisa menopang itu hal-hal yang mengakumulasi mendasari kami bersama dengan dinas yang lain untuk inisiasi raperda ini alhamdulillah pihak DPRD bisa lanjut.

- Saya sebagai kepala bidang distribusi penyelenggaraan cadangan pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser di Tana Paser

Memang pada tahun 2020 kita mengajukan raperda itu ada 2 buah tentang ketahanan pangan dan gizi dan raperda tentang cadangan pangan sehingga kita adakan rapat pada saat ini mana yang sudah siap, dan pada waktu yang diteruskan adalah raperda cadangan pangan yang sudah siap dan ketahanan pangan dan gizi kita tunda dan dimasukkan kembali pada tahun 2022 jadi betul sekali apa yang dikatakan dulu ada cadangan pangannya, karena ketahanan pangan adalah merupakan sebagian dari mengelola ketahanan pangan itu amanat dalam PP memang ketahanan pangan sangat penting itu lah dasar kita cadangan pangan tadi diarahkan kondisi cadangan pangan yang ada di daerah kita, karna kondisi harga, harga semalam 5 bulan berturut-turut sebesar 10 persen kita sudah bisa mengeluarkan cadangan pangan kita itu salah satu. Yang

kedua bencana banjir, kebakaran jalan putus dan sebagainya di tahun 2021 kemaren kita ada bajir dan jalan putus tadi di daerah muara koman mengacu kepada permentan nomor 11 tentang ketahanan pangan dasar beritungnya memberitungkan dasar ketahanan pangan kita dan provinsi kaltim kita saling seput, jadi hasil perhitungan itu seharusnya memiliki cadangan pangan 100,56 ton itu berdasarkan perhitungan dan alhamdulillah kita semakin bagus stoknya untuk penganggarannya tahun ini di akhir tahun 2021 ada 57 pengadaan dan ada 40 rencana pengadaan 2022 total kita punya 20 ambir 100 kita sudah capat untuk mencapai saya kira suatu catatan tersendiri bagi kita paser di kalimantan timur yang paling baik dalam nyesiapkannya lebih seksi ketika Covid kemendagri memberikan intruksinya supaya ini harus ada alhamdulillah terkabul semuanya jadi cadangan pangan tadi sifatnya satu sisi untuk cadangan pangan tapi sifat insidentil tidak bisa terus menerus jadi kekuatan kita, satu hal lagi cadangan pangan bisa kita gunakan di PPU ada bencana bisa kita boleh kirimkan sekali lagi cadangan pangan sifat untuk pengatasi suatu bencana singkat dan tentunya cadangan pangan harus mempersiapkan yang lainnya, satu hal lagi yang membanggakan kita semua kami yang berkerja merasa kepala dinas ketahanan menjadi bersengat saya lihat mulai didirikan ketahanan pangan mulai diperankan disana ada amanah (20.11 menit)

- Budi Santoso, S.T.,M.Si

Karena menyangkut hak banyak hak azasi, di daerah lain di kabupaten/kota Perbup/Perwali, Banjarmasin masin itu di kepung dengan 700 jiwa bagian perkotaan lahan pangan dan bisnis bisa control kalau disini harga cabe rawet di ada papan informasi yang bisa dilihat ini adalah tugas kita juga kira-kira paser sudah punya belum, minimal kalau kita tidak punya radio minimal punya lah papan tidak ada lagi penyelewengan harga lagi itu adalah salah satu solusi juga dalam pengawasan

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser di Tana Paser

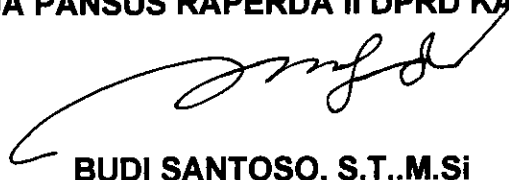
Untuk kedepan terkait perkembangan IKN dan juga kalau tanggung jawab kami di Dinas Ketahanan Pangan terkait kebutuhan pangan untuk produk beras tahun 2021 sekitar 26000 ton beras sedangkan kebutuhan 1000 ton ada seplus 25.000 ton perkiraan setiap tahun 12 persen kalau dilihat dari produksi kita masih cukup,

H. PENUTUP

Demikian Notulen hasil Rapat Pansus Raperda II DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Terkait membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi, dibuat sebagai Bahan Laporan.

Tana Paser , 22 Maret 2022

**PIMPINAN RAPAT,
KETUA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER,**



BUDI SANTOSO, S.T.,M.Si